



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 12 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN

UNIT KERJA : STAF AHLI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **NUFRANSA WIRA SAKTI**
2. Jabatan : **STAF AHLI BIDANG PENGAWASAN PAJAK**
3. NHK : **120533**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 21.925.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 391 m2/264 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 382 m2/100 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , Rp. 5.500.000.000
3. Tanah Seluas 1.000 m2 di KAB / KOTA BOGOR, Rp. 225.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 267 m2/170 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG SELATAN, Rp. 3.000.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 500 m2/200 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 8.200.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 1.152.000.000**

1. LAINNYA, BROMPTON SEPEDA LIPAT Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 35.000.000
2. LAINNYA, BROMPTON SEPEDA LIPAT Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 22.000.000
3. MOBIL, HONDA BRV Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
4. LAINNYA, WILLIERS ROAD BIKE Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000
5. MOBIL, WULING EV MINIBUS Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 175.000.000
6. MOBIL, HYUNDAI PALISADE MINIBUS Tahun 2023, HASIL



SENDIRI Rp. 700.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 1.536.500.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. 293.219.500

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 1.828.633.803

F. HARTA LAINNYA

Rp. 400.000.000

Sub Total

Rp. 27.135.353.303

III. HUTANG

Rp. 6.734.319.446

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 20.401.033.857

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.